

**STUDI PROSES PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



**MIRANDA AFRI
TM/NIM: 2012/1205996**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

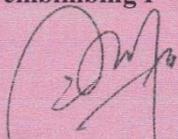
**STUDI PROSES PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN**

Nama : Miranda Afri
TM/NIM : 2012/1205996
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

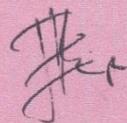
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Al Rafni, M. Si
NIP. 19680212 199303 2 001

Pembimbing II



Estika Sari, SH.
NIP. 19670517 199403 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

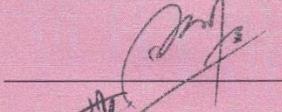
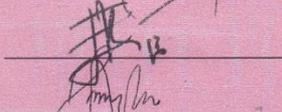
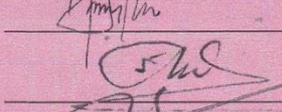
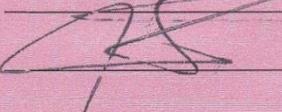
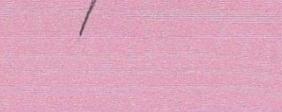
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, 03 Agustus 2016 Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB

Studi Proses Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman

Nama : Miranda Afri
TM/NIM : 2012/1205996
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M. Si	
Sekretaris	: Estika Sari, SH	
Anggota	: Henni Muchtar, SH., M. Hum	
Anggota	: Dra. Aina, M. Pd	
Anggota	: Dr. Hasrul, M. Si	

**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIRANDA AFRI
Nim/Tahun Masuk : 1205996/2012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Studi Proses Proses Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Saya yang menyatakan



MIRANDA AFRI
NIM. 1205996

ABSTRAK

Miranda Afri, 2012/1205996 :Studi Proses Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pariaman yang diindikasikan masih ada pajak daerah yang belum memenuhi target di kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pariaman, (b) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang tidak memenuhi target, (c) mengidentifikasi upaya pemerintah agar pemungutan pajak daerah berjalan lancar dan dapat mencapai target.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini diambil dari kesepuluh jenis pajak daerah yang dipungut di kota Pariaman. Lokasi penelitian adalah Kantor Pendapatan Asli Daerah (KPAD) kota Pariaman. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Temuan penelitian merujuk hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pariaman yang dapat dilihat dari: 1) pendataan; 2) Penetapan; dan 3) Pemungutan; dan 4) penagihan. Adapun dari keempat tahap tersebut yang menjadi kendala dominan adalah pada tahap pendataan. Hal ini terbukti bahwa pada saat pendataan dilakukan, banyak masyarakat yang tidak mau mengisi SPT yang diberikan petugas. Sehingga hal ini juga menandakan bahwa wajib pajak tersebut keberatan untuk membayar pajak. Menindaklanjuti kendala tersebut pemerintah kota Pariaman terkhusus DPPKA kota Pariaman melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang pentingnya membayar pajak bagi setiap warga negara. *Kedua*, Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang belum memenuhi target adalah: 1) kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 2) kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah; 3) pelaksanaan pemungutan pajak yang belum sesuai dengan Perda yang mengatur, 4) kurangnya petugas pajak yang melaksanakan pemungutan pajak. *Ketiga*, Upaya pemerintah adalah berusaha dengan sebaik mungkin untuk melakukan pemungutan pajak daerah dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap pajak serta sosialisasi Perda masing-masing jenis pajak daerah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul : **“Studi Proses Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman.”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, S. Pd., M. Pd selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial politik Fakultas Ilmu Sosoal Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Al Rafni, M. Si, selaku pembimbing I dan Ibu Estika Sari, SH, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Henni Muchtar, SH, M. Hum, Ibu Dra. Aina, M. Pd, Bapak Dr. Hasrul, M. Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Alia Azmi, S.IP.,M.Si, selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta (Alm) Syafri dan Ibunda tercinta Nurafni atas cinta, do'a, dukungan dan semangat tanpa henti yang diberikan. Uda Yosdi Afri dan Cikni Putri Nadia Afri yang selalu mendukung dan memberi semangat. Juga kepada keluarga besar yang sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada penulis.
9. Terkhusus untuk AMAR, Annisya Luthfi Nadilla, Miranda Afri, Alfiani dan Rahma Desiana yang selalu menemani, saling memberi dukungan, yang menjadi kakak, adik, sahabat, tempat menangis dan tempat meredakan amarah bahkan tempat untuk ceria bersama.
10. Terkhusus lagi Fadhilla Fitri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga untuk anak-anak Asrama Putri Catelya, Marcellyna, Hesti Syafira, Wenny Silvia Sari serta semua anak Asrama Putri Catelya yang telah menjadi keluarga kedua di perantauan.
11. Rekan-rekan mahasiswa teristimewa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Angkatan 2012
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang.

Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Juli 2016

Penulis

Miranda Afri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pajak Daerah	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Desentralisasi Fiskal Daerah.....	11
2. Peranan Pajak dalam Otonomi Daerah.....	12
a. Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah..	12
b. Potensi Pajak di Daerah Otonomi Baru dan Optimalisasi Pemungutan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Daerah	14
c. Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak	16
d. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pemungutan Pajak	19
B. Kerangka Konseptual.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Informan Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Uji Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	28

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Organisasi Bidang Pendapatan.....	30
B. Temuan Umum.....	31
1. Visi dan Misi DPPKA.....	31
2. Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.....	32
3. Jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kota Pariaman.....	36
C. Temuan Khusus	41
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Pariaman.....	41
2. Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Daerah	95
3. Upaya Pemerintah agar Pemungutan Pajak Daerah Berjalan Lancar dan Memenuhi Target.....	113
D. Pembahasan	125
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Pariaman.....	125
2. Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Daerah	138
3. Upaya Pemerintah agar Pemungutan Pajak Daerah Berjalan Lancar dan Memenuhi Target.....	142
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
KEPUSTAKAAN	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	23

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pajak Daerah.....	3
2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2015.....	4
3. Daftar Nama Informan.....	26
4. Jumlah Petugas Pajak kota Pariaman tahun 2014-2015.....	35
5. Klasifikasi Restoran kota Pariaman tahun 2014-2015.....	46
6. Data Objek pajak restoran kota Pariaman tahun 2014.....	46
7. Data Objek pajak restoran kota Pariaman tahun 2015.....	49
8. Data Restoran Tutup tahun 2014-2015.....	51
9. Data cafe kota Pariaman tahun 2014-2015.....	51
10. Target dan Realisasi Pajak Restoran kota Pariaman tahun 2014 s/d 2015.....	54
11. Klasifikasi Hotel kota Pariaman tahun 2014-2015.....	55
12. Data Objek pajak hotel kota Pariaman tahun 2014.....	56
13. Data Objek pajak hotel kota Pariaman tahun 2015.....	57
14. Target dan Realisasi Pajak Hotel kota Pariaman tahun 2014 s/d 2015.....	59
15. Data Objek pajak Hiburan kota Pariaman tahun 2014.....	61
16. Data Objek pajak Hiburan kota Pariaman tahun 2015.....	61
17. Objek Pajak Hiburan yang Dikelola Pemerintah Daerah kota Pariaman.....	62
18. Tarif Pajak Hiburan kota Pariaman tahun 2014-2015.....	64
19. Target dan Realisasi Pajak Hiburan kota Pariaman tahun 2014 s/d 2015.....	65
20. Data Objek pajak Reklame kota Pariaman tahun 2014-2015.....	67
21. Jumlah Objek pajak Reklame kota Pariaman tahun 2014.....	68
22. Jumlah Objek Pajak Reklame kota Pariaman tahun 2015.....	69

23. Target dan Realisasi Pajak Reklame kota Pariaman tahun 2014 s/d 2015.....	71
24. Data Objek Pajak Penerangan Jalan kota Pariaman tahun 2014-2015.....	72
25. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan kota Pariaman Tahun 2014-2015.....	73
26. Data Objek pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C kota Pariaman tahun 2014.....	75
27. Data Objek pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C kota Pariaman tahun 2015.....	75
28. Target dan Realisasi pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C kota Pariaman tahun 2014 s/d 2015.....	78
29. Data Objek pajak Parkir kota Pariaman tahun 2014.....	80
30. Data Objek pajak Parkir kota Pariaman tahun 2015.....	80
31. Target dan Realisasi Pajak Parkir kota Pariaman tahun 2014 s/d 2015.....	83
32. Data Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kota Pariaman tahun 2014-2015.....	84
33. Target dan Realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kota Pariaman tahun 2014 s/d 2015.....	86
34. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.....	87
35. Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014-2015.....	88
36. Klasifikasi NJOP Bumi untuk Objek Pajak Pedesaan dan Perkotaan.....	89
37. Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Pedesaan dan Perkotaan.....	92
38. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014-2015.....	94
39. Jumlah Petugas pajak kota Pariaman tahun 2016.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	153
2. Daftar Informan	156
3. Dokumentasi.....	157
4. Surat Tugas.....	
5. Izin Penelitian.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6) menyatakan Otonomi Daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Untuk bisa memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula dan daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, salah satunya mengumpulkan dana dari sumber penerimaan daerah. Adapun yang termasuk ke dalam sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat 1 antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak , hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Pendapatan transfer; dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh semua warga Negara yang bersifat memaksa dimana kegunaannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kota Pariaman merupakan kota kecil yang baru dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, Kota Pariaman merupakan kota yang sedang membangun dan mengandalkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pemasukan daerah. Ada sepuluh jenis pajak yang dipungut di Kota Pariaman dimana kesepuluh jenis pajak ini memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pemasukan di kota tersebut. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut antara lain: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak BPHTB; (9) Pajak Sarang Burung Walet; dan (10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang masing-masing pajak daerah ini, antara lain.

Tabel 1
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pajak Daerah

NO	PAJAK / RETRIBUSI	PERDA
	PAJAK DAERAH	
	<i>Pajak Daerah</i>	
1	Pajak Hotel	Perda No. 10 Tahun 2012
2	Pajak Restoran	Perda No. 9 Tahun 2012
3	Pajak Hiburan	Perda No. 5 Tahun 2010
4	Pajak Reklame	Perda No. 12 Tahun 2012
5	Pajak Penerangan Jalan	Perda No. 13 Tahun 2012
6	Pajak Parkir	Perda No. 11 Tahun 2012
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perda No. 6 Tahun 2010
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Perda No. 2 Tahun 2011
9	Pajak Sarang Burung Walet	Perda No. 3 Tahun 2011
10	Pajak Bumi dan Bangunan	Perda No. 6 Tahun 2013

Sumber : *DPPKA Kota Pariaman*

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada sepuluh jenis pajak yang dipungut di Kota Pariaman. Kesepuluh jenis pajak inilah yang digali oleh pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan pemasukan daerahnya. Namun, dari kesepuluh pajak daerah yang dipungut, masih ada pajak daerah yang belum memenuhi target. Inilah persoalan yang dihadapi bahwa jika pemasukan di suatu daerah kecil, maka daerah tersebut akan mengalami kekurangan dana daerahnya sehingga hal ini akan berdampak pada pembangunan daerah tersebut.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pariaman pada tahun 2015, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pariaman
Tahun 2015

No	Pajak Daerah	Target	Penerimaan	%
1	Pajak Hotel	80.000.000	104.854.600	131.07
2	Pajak Restoran	1.000.000.000	817.570.940	81.76
3	Pajak Hiburan	12.500.000	3.220.000	25.76
4	Pajak Reklame	150.000.000	146.913.475	97.94
5	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000	2.401.361.942	120.07
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	300.000.000	532.961.500	177.65
7	Pajak Parkir	12.160.800	14.510.200	119.32
8	Pajak BPHTB	650.000.000	1.065.023.950	163.85
9	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000	-	-
10	PBB	976.561.288	874.564.574	89.56

Sumber: *DPPKA Kota Pariaman Tahun 2015*

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada pajak daerah yang belum berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Seperti pada pajak restoran, penerimaannya sebesar Rp. 817.570.940, sedangkan target yang diharapkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000. Selanjutnya, pajak hiburan penerimaannya hanya sebesar Rp. 3.220.000, padahal target yang diharapkan adalah sebesar Rp. 12.500.000. Dan yang terakhir adalah pajak reklame dimana penerimaannya sebesar Rp. 146.913.475, sedangkan target yang diharapkan adalah Rp. 150.000.000. Sebagai Kota yang merupakan daerah otonomi baru, sector pajak daerah merupakan aspek yang sangat penting untuk menunjang pembangunan di

Kota Pariaman. Selain itu, jika semua wajib pajak taat membayar pajak maka penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Pariaman dapat meningkat dan akan melebihi target yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Albert Tanjung selaku Staff DPPKA pada tanggal 14 Januari 2016, masih ada beberapa pajak daerah yang belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi baik itu dari segi teknis maupun non teknisnya. Beliau mengatakan:

“Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah ini adalah dari segi teknisnya, kami kekurangan orang untuk memungut kesepuluh pajak ini. Pajak daerah yang dipungut ada sepuluh jenis pajak, namun kami hanya bisa melakukan pemungutan pajak untuk beberapa jenis pajak saja, misalnya pajak restoran. Selain itu, kendalanya adalah kami masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa membayar pajak itu sangat penting untuk pembangunan daerah. Selanjutnya, kendala yang kami hadapi adalah masyarakat banyak yang tidak mau membayar pajak. mereka mengemukakan alasan yang bermacam-macam untuk tidak membayar pajak. Pernah kejadian waktu itu ketika kami menagih pajak hiburan, wajib pajaknya marah-marah kepada kami dan bilang bahwa mereka tidak mau membayar pajak dan mereka juga tidak takut dengan hukuman atau sanksi dari pemerintah. Melihat mereka marah-marah, kami akhirnya pergi saja karena tidak mau terjadi keributan.”

Berdasarkan wawancara di atas, maka penulis mengklasifikasikan kendala pemungutan pajak ini ke dalam dua jenis, yaitu kendala teknis dan non teknis. Adapun kendala teknis yang dihadapi adalah adanya kekurangan aparat fiskus, sehingga ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan pemungutan kesepuluh pajak yang ada di Kota Pariaman, mulai dari pendataan sampai kepada penagihan. Selain itu kendala lainnya adalah belum maksimalnya sosialisasi

kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah.

Selanjutnya, kendala non teknis yang terjadi adalah masyarakat bersikeras tidak mau membayar pajak, bahkan sampai mengatakan bahwa mereka tidak takut akan sanksi dari pemerintah. Padahal pengertian pajak itu sendiri adalah kewajiban yang harus dibayar oleh semua warga Negara yang bersifat memaksa, dimana artinya bahwa jika ada warga Negara yang tidak membayar pajak maka akan ada sanksi yang tegas dari pemerintah. Namun yang terjadi adalah masyarakat tidak takut lagi akan tegasnya hukum yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan suatu fenomena yang harus dicarikan solusinya agar tidak terulang untuk yang selanjutnya.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **"Studi Proses Pemungutan Pajak di Pemerintah Kota Pariaman"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Pariaman.
3. Terdapat kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Kota Pariaman.
4. Belum optimalnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemungutan pajak di Kota Pariaman.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka batasan masalahnya adalah mendeskripsikan Studi Proses Pemungutan Pajak di Pemerintah Kota Pariaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain.

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Pariaman?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang tidak memenuhi target?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah agar pemungutan pajak daerah berjalan lancar dan dapat mencapai target?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Pariaman.
4. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang tidak memenuhi target.
5. Mengidentifikasi upaya pemerintah agar pemungutan pajak daerah berjalan lancar dan dapat mencapai target.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, khususnya pajak daerah. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang terjadi sebenarnya dilapangan.

2. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengelolaan pajak daerah agar pajak daerah ini bisa dilaksanakan dengan baik dan melebihi dari target yang telah ditetapkan serta bisa meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

3. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan timbulnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pajak daerah ini agar bisa terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.